

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Perdagangan internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP (Apridar, 2009:69). Perdagangan internasional sangat berpengaruh pada tingkat harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja di negara-negara yang terlibat. Menurut Apridar (2009:74) ada beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan Internasional, yaitu sebagai berikut :

1. untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri,
2. untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara,
3. adanya perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah dan mengelola sumber daya ekonomi,
4. adanya kelebihan produksi dalam negeri sehingga dibutuhkan pasar baru untuk menjualnya,
5. adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, budaya, tenaga kerja dan jumlah penduduk yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil produksi suatu negara dengan negara lainnya,

6. adanya kesamaan selera terhadap suatu barang,
7. untuk mempererat hubungan kerja sama politik dengan negara lain,
8. terjadinya era globalisasi sehingga antara satu negara dengan negara lainnya saling membutuhkan.

Sementara itu menurut Sukirno (2007:18), manfaat perdagangan internasional adalah :

1. memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi setiap negara. Faktor-faktor tersebut antara lain : kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri,
2. memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi di negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang dari luar negeri,
3. memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat

menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri,

4. transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Dalam era globalisasi dan semakin kompetitifnya pasar perdagangan internasional saat ini, setiap negara dituntut untuk mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat menghasilkan komoditi yang mampu bersaing dengan negara lainnya.

2.1.1.1 Teori Keunggulan Absolut

Menurut Adam Smith dalam Salvatore (2014:32), perdagangan antar dua negara didasarkan pada keunggulan absolut, yaitu apabila sebuah negara mempunyai keunggulan absolut dari negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut, dan menukarkannya dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut.

Melalui proses spesialisasi, sumber daya di kedua negara dapat digunakan dalam cara yang paling efisien . Output kedua komoditi yang diproduksi akan meningkat. Peningkatan dalam output ini akan mengukur keuntungan dari spesialisasi produksi untuk kedua negara yang melakukan perdagangan (Salvatore, 2014: 33).

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa satu jam kerja dapat menghasilkan enam karung gandum di Amerika Serikat (AS), sementara itu di Inggris hanya dapat menghasilkan satu karung gandum. Di lain pihak dalam satu jam di Inggris dapat menghasilkan lima meter kain dan di AS hanya empat meter kain. Jadi, AS memiliki keunggulan absolut (lebih efisien) terhadap Inggris dalam memproduksi gandum. Di lain sisi, Inggris memiliki keunggulan absolut (lebih efisien) terhadap AS dalam memproduksi kain. Jika kedua negara melakukan perdagangan, maka AS akan berspesialisasi untuk memproduksi gandum dan Inggris akan berspesialisasi untuk memproduksi kain.

Tabel 2.1
Keunggulan Absolut

	Amerika Serikat	Inggris
Gandum (karung/jam kerja)	6	1
Kain (meter/jam kerja)	4	5

Sumber: Salvatore, 2014: 34

Jika AS menukarkan enam karung gandum untuk enam meter kain Inggris, maka AS akan memperoleh keuntungan dua meter kain (Selisih antara 6 meter kain dari Inggris dengan 4 meter kain yang dapat di produksi secara domestik oleh AS) atau menghemat $\frac{1}{2}$ jam kerja. Sementara itu Enam karung gandum yang diterima Inggris dari AS adalah ekuivalen dengan produksi gandum di Inggris selama enam jam kerja. Enam jam kerja tersebut apabila seluruhnya digunakan untuk memproduksi kain, maka akan menghasilkan 30 meter kain. Jadi, dalam pertukaran ini Inggris mendapatkan keuntungan sebesar 24 meter kain (Selisih

antara 30 meter kain yang dapat diproduksi oleh Inggris dalam 6 jam dengan 6 meter kain yang ditukarkan ke AS). Meskipun keuntungan yang diperoleh Inggris lebih besar dari AS perdagangan tetap dapat terjadi selama kedua negara mendapatkan untung.

2.1.1.2 Teori Keunggulan komparatif

Pada tahun 1817, David Ricardo menerbitkan tulisannya mengenai *Principle of Political Economy and Taxation*, yang mana ia menyajikan hukum keunggulan komparatif. Ini adalah salah satu hukum yang paling penting dan masih tak tertandingi dalam bidang ekonomi, dan bisa diaplikasikan. Menurut hukum keunggulan komparatif, bahkan jika satu negara kurang efisien daripada negara lain dalam produksi kedua komoditas, masih ada landasan untuk perdagangan yang saling menguntungkan. Negara pertama harus mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang mempunyai kerugian absolut yang lebih kecil dan mengimpor komoditas yang mempunyai kerugian absolut yang lebih besar (salvatore : 2014:35)

Tabel 2.2 menjelaskan teori keunggulan komparatif secara numeris melalui ilustrasi. Dapat dilihat bahwa dalam satu jam kerja di Amerika Serikat (AS) dapat menghasilkan enam karung gandum dan empat meter kain, sementara itu di Inggris dapat menghasilkan satu karung gandum dan dua meter kain. Berdasarkan teori keunggulan absolut dari Adam Smith, maka perdagangan tidak akan terjadi karena Inggris mengalami kerugian absolut terhadap AS pada dua komoditi yang diproduksi. Namun, berdasarkan teori keunggulan komparatif,

perdagangan masih bisa dilakukan apabila Inggris berspesialisasi untuk memproduksi dan mengekspor komoditi yang paling rendah kerugian absolutnya.

Tabel 2.2

Keunggulan Komparatif

	Amerika Serikat	Inggris
Gandum (karung/jam kerja)	6	1
Kain (meter/jam kerja)	4	2

Sumber: Salvatore, 2014:35

Jika AS menukarkan enam karung gandumnya dengan enam meter kain dari Inggris, maka AS akan mendapatkan untung sebesar dua meter kain yang merupakan selisih dari enam meter kain dari Inggris dengan empat meter kain yang dapat diproduksi secara domestik oleh AS. Melalui pertukaran ini Inggris juga mendapatkan keuntungan. Enam karung gandum yang diterima dari AS dapat dihasilkan secara domestik oleh Inggris setelah enam jam kerja. Apabila enam jam kerja itu digunakan untuk memproduksi kain maka akan dihasilkan 12 meter kain (2 meter x 6 jam), sehingga Inggris memperoleh keuntungan sebesar enam meter kain yang merupakan selisih dari 12 meter kain yang dihasilkan dengan enam meter kain yang ditukarkan dengan enam karung gandum dari AS.

2.1.1.3 Teori Heckscher-Ohlin

Menurut teori Heckscher-Ohlin, suatu negara akan mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif berlimpah dan murah, dan mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang

jumlahnya relatif langka dan harganya mahal (salvatore : 2014:120). Artinya, sebuah negara yang memiliki tenaga kerja yang melimpah akan mengekspor komoditi-komoditi yang relatif padat karya dan mengimpor komoditi-komoditi yang relatif padat modal.

Teori ini mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi (Apridar, 2009: 100). Selain itu teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada asumsi – asumsi berikut (Salvatore, 2014:112) :

1. ada dua negara, dua komoditas, dan dua faktor produksi,
2. kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi,
3. komoditi X secara umum bersifat padat karya dan komoditi Y bersifat padat modal di kedua negara,
4. kedua komoditi tersebut diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan,
5. ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara,
6. selera yang sama di kedua negara,
7. ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara,
8. ada mobilitas faktor yang sempurna didalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional,
9. tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional,
10. semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara,

11. perdagangan internasional antara dua negara seimbang.

2.1.2. *Gross Domestic Product (GDP)*

GDP merupakan pengukuran yang paling luas dari total output barang dan jasa suatu Negara. GDP merupakan jumlah nilai konsumsi (C), investasi bruto (I), pembelanjaan pemerintah atas barang dan jasa (G), dan ekspor netto (X). yang dihasilkan di dalam suatu Negara selama satu tahun tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 2004:99). Cara lain untuk melihat GDP adalah sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa perekonomian. GDP seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (sukirno, 2006:9). Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan rumus sebagai berikut :

$$Gr = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100 \% \dots \dots \dots (2.1)$$

Keterangan :

Gr : tingkat (persentase pertumbuhan ekonomi)

GDP_t : pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai dalam suatu tahun (1 tahun)

GDP_{t-1} : pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya

GDP dibagi menjadi GDP Nominal dan GDP Riil. GDP Nominal adalah total kuantitas barang yang diproduksi pada periode tertentu menurut tingkat

harga yang berlaku (yaitu harga yang berlaku pada tahun perhitungan). GDP Riil adalah total kuantitas barang yang diproduksi pada periode tertentu menurut tingkat harga konstan (harga-harga yang berlaku pada tahun dasar). Perbedaan antara GDP Nominal dan GDP Riil terletak pada kenaikan harga, sehingga di sini dapat terjadi GDP deflator. GDP deflator mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga barang yang diproduksi dalam perekonomian.

GDP deflator = GDP Nominal / GDP Riil.....(2.2)

GDP Riil menjelaskan mengenai ukuran ekonomi suatu negara (Blanchard, 2004:26). Negara yang memiliki GDP Riil dua kali lipat dari negara lain, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi negara tersebut lebih besar dua kali lipat dari negara lain.

Selain GDP nominal dan GDP riil, ada pula GDP perkapita. GDP perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk. Jadi untuk menghitung GDP perkapita digunakan rasio dari GDP riil terhadap populasi suatu negara. GDP perkapita memberikan gambaran mengenai rata-rata standar hidup suatu negara (Blanchard, 2004:26).

2.1.3 Country size

Selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak perdebatan diantara para peneliti tentang pengelompokan negara berdasarkan ukuran yang berbeda. Selwyn (1980), Coulson (1982), Diggins (1985), dan yang terbaru adalah penelitian yang dilakukan oleh Briguglio (2002). Para peneliti tersebut menghasilkan teori yang berbeda-beda dari penelitian yang dilakukan. Selwyn (1980) mengatakan bahwa ukuran suatu negara ditentukan oleh besar kecilnya perdagangan luar negeri yang

dilakukan oleh negara tersebut dalam suatu kurun waktu. Briguglio (2002) membagi besar kecilnya suatu negara berdasarkan kemampuan suatu negara tersebut berdasarkan kemampuan negara tersebut mempengaruhi harga-harga di pasar internasional.

Sejauh ini, teori yang sering dijadikan acuan tentang cara menentukan ukuran suatu negara adalah populasi. Populasi dianggap menjadi alat ukur paling tepat yang digunakan untuk membagi besar kecilnya suatu negara. Read (2001) menyatakan bahwa populasi adalah metode terbaik dalam menentukan ukuran suatu negara, karena populasi memiliki kandungan informasi dan memiliki kemudahan dalam konseptualisasi. Craigwell dan Thomas (2010) menyatakan bahwa metode populasi dalam mengukur besar kecilnya suatu negara merupakan metode yang menarik dari sudut pandang ekonomi karena mencerminkan ukuran angkatan kerja yang terdapat di suatu negara, dan dengan metode tersebut maka akan dapat diketahui kendala yang mungkin muncul terkait sumber daya manusia, serta dapat diketahui pula potensi jumlah konsumen yang terdapat dalam negara tersebut. Craigwell dan Thomas (2010) juga mengatakan bahwa populasi menggambarkan jumlah produsen dan konsumen barang dan jasa yang telah dihasilkan. Dengan demikian, populasi adalah metode yang paling tepat untuk dijadikan ukuran suatu negara.

2.1.4 Anggaran Belanja Pemerintah

Anggaran belanja pemerintah menggambarkan ukuran dari pemerintah (*government size*) dan memiliki dua fungsi ekonomi utama. Pertama, sebagai sebuah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur prioritas nasional.

Kedua, menyediakan insentif untuk meningkatkan atau mengurangi output di sektor-sektor tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 2004:434). Belanja pemerintah mencakup pembelanjaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah (Mankiw, 2006:12).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Perkembangan kegiatan pemerintah memiliki peran yang akan selalu meningkat setiap tahunnya di segala bidang ekonomi. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dan proporsinya terhadap pendapatan nasional.

Anggaran belanja pemerintah terdiri dari tiga bagian, yaitu anggaran belanja siklikal, struktural, dan aktual. Anggaran belanja aktual mencatat pengeluaran aktual, penghasilan dan defisit pada waktu tertentu. Anggaran belanja struktural digunakan untuk menghitung apa yang akan terjadi dengan penghasilan, pengeluaran, dan defisit pemerintah jika perekonomian dioperasikan pada output potensial. Sedangkan anggaran belanja siklikal berfungsi untuk menghitung dampak siklus bisnis pada anggaran belanja, memasukkan efek siklus pada penghasilan, pengeluaran, dan defisit (Samuelson dan Nordhaus, 2004:434).

2.1.5. Trade openness, country size, dan government size.

2.1.5.1 Trade openness dan government size

Perdagangan internasional menuntut suatu negara untuk dapat melakukan produksi secara lebih efektif dan produktif dengan cara peningkatan teknologi. Mankiw (2007:214) mengatakan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarahkan ke

pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja, sehingga pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi suatu negara juga bergantung pada kebijakan pemerintah dalam melakukan transfer teknologi yang akan diterapkan di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus mengalokasikan belanjanya untuk meningkatkan kemajuan teknologi yang ada di negara tersebut.

Sukirno (2012:168) mengatakan bahwa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Dalam mencapai tujuan itu, pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh. Misalnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian, negara dapat meningkatkan output negaranya dengan teknologi yang lebih maju agar dapat melakukan produksi secara lebih efisien untuk bersaing di pasar global.

Apridar (2009:270) menyatakan bahwa perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai banyak pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang lebih luas dari pasar dalam negeri. Sehingga produk dalam negeri dituntut untuk mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional, dan pemerintah berperan penting

dalam membuat dan menjalankan regulasi dalam melakukan produksi dan perdagangan.

Penelitian tentang hubungan antara *trade openness* dan *government size* telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rodrik (1996); Alesina dan Wacziarg (1998); Benarroch dan Pandey (2008). Beberapa peneliti menyebutkan bahwa semakin kecil *government size*, maka suatu negara akan semakin terbuka dalam melakukan perdagangan. Rodrik (1996) mengatakan bahwa hubungan antara *trade openness* dan *government size* adalah positif. Rodrik (1996) mengatakan bahwa jika negara semakin terbuka dalam melakukan perdagangan, maka negara tersebut akan rentan dengan terjadinya guncangan di pasar dunia, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Alesina dan Wacziarg (1998) juga mengatakan bahwa semakin terbukanya suatu negara dalam melakukan perdagangan, akan menyebabkan pembayaran pemerintah semakin meningkat, seiring dengan tingginya resiko yang dihadapi negara dari semakin terbukanya perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan *government size* yang lebih besar jika *trade openness* suatu negara semakin besar.

Berbeda dengan Rodrik (1996), Benarroch dan Pandey (2008) mengungkapkan bahwa *trade openness* suatu negara berhubungan negatif dengan *government size* suatu negara. Menurutnya, jika *government size* suatu negara semakin besar, maka negara tersebut akan cenderung melakukan intervensi yang lebih besar di dalam pasar. Besarnya tingkat intervensi pemerintah tersebut dilakukan khususnya di pasar internasional, sehingga negara tersebut tidak

bergantung pada pasar internasional. Dengan demikian, negara dengan *government size* yang semakin besar akan cenderung lebih proteksionis dan menurunkan *trade openness*.

2.1.5.2 Trade openness dan Country size

Para ekonom percaya bahwa negara-negara miskin sebaiknya menjalankan kebijakan-kebijakan berorientasi ke luar yang mengintegrasikan negara-negara tersebut kedalam perekonomian dunia. Perdagangan internasional dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu negara. Perdagangan adalah salah satu jenis teknologi. Ketika suatu negara mengekspor gandum dan mengimpor baja, negara tersebut mendapatkan keuntungan yang sama dengan apabila menemukan teknologi untuk mengubah gandum menjadi baja (Mankiw, 2006:70).

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor produksi. Menurut Salvatore (2014:136), modal manusia yang terkait dengan penelitian dan pengembangan (R&D) memiliki pengaruh terhadap tingkat ekspor. Modal pengetahuan yang dihasilkan dari R&D menyebabkan peningkatan nilai hasil yang berasal dari persediaan materi dan sumber daya manusia. Sebagian besar ekspor Amerika Serikat adalah komoditas yang padat R&D dan keterampilan. Dengan demikian, manusia dan modal pengetahuan merupakan pertimbangan penting dalam menentukan pola perdagangan.

Trade openness dan *country size* merupakan dua variabel yang sering saling dikaitkan oleh beberapa peneliti seperti Alesina dan Wacziarg (1998), Ram (2009), dan Parmeter dan Jetter (2015). Mereka percaya bahwa *trade openness*

dan *country size* memiliki kaitan yang erat, yakni bahwa populasi dan perdagangan internasional dapat saling mempengaruhi. Salvatore (2009:30) mengatakan bahwa kekayaan suatu negara dapat diukur dengan populasi manusia, produktivitas manusia, dan sumber daya alam yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan demikian, negara dengan populasi yang besar, tentu saja dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih besar, sehingga negara akan mendapatkan keuntungan jika melakukan perdagangan internasional atas produksi barang dan jasa di negaranya.

Alesina dan Wacziarg (1998) melakukan penelitian tentang hubungan antara *trade openness* dan *country size*. Mereka mendapatkan kesimpulan bahwa *trade openness* dan *country size* memiliki hubungan yang negatif. Jika negara memiliki *country size* yang kecil, maka negara tersebut akan cenderung memiliki *trade openness* yang besar. Hal tersebut dikarenakan bahwa negara yang memiliki *country size* yang kecil, cenderung menerapkan tarif yang lebih rendah terhadap barang dan jasa yang masuk ke negara mereka, sehingga semakin besar pula volume perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh negara tersebut. Negara dengan *country size* yang rendah cenderung memiliki *market size* yang kecil di dalam negeri, untuk itu mereka harus membuka pasar luar negeri untuk memperluas pasar dan mendorong ekspor. Salah satu cara untuk memperluas pasar luar negeri adalah dengan menurunkan tarif. Tarif yang rendah membuat negara yang melakukan perdagangan dapat saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Menurut Apridar (2009 : 122) hambatan dalam perdagangan akan

mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain.

Ram (2009) serta Jetter dan Parmeter (2015) mengatakan bahwa hubungan antara *trade openness* dan *country size* adalah positif. Jika *country size* suatu negara semakin besar, cenderung akan memiliki *trade openness* yang besar pula. Hal tersebut karena jika *country size* besar, maka produktivitas suatu negara akan meningkat. Jumlah penduduk yang merupakan salah satu faktor produksi, akan mampu mendorong produktivitas jika pelatihan dan pendidikan tenaga kerja ditingkatkan. Menurut Salvatore (2009:194), berkembangnya populasi akan bersamaan dengan berkembangnya ukuran angkatan kerja suatu negara. Dengan memanfaatkan sebagian dari sumber dayanya untuk menghasilkan peralatan modal, negara meningkatkan persediaan modal. Modal merujuk kepada peralatan buatan manusia yang digunakan dalam produksi, seperti mesin, pabrik, transportasi, dan komunikasi, demikian pula dengan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dapat meningkatkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan demikian, semakin banyak populasi di suatu negara, akan meningkatkan produksi, sehingga mampu meningkatkan volume perdagangan.

2.1.5.3 *Government size* dan *country size*

Government size adalah suatu elemen penting bagi suatu negara dalam melaksanakan pemerintahannya. *Government size* yang identik dengan pengeluaran pemerintah, merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi suatu negara dalam menciptakan stabilitas ekonomi di suatu negara. Menurut

sukirno (2012:168) di negara-negara yang sudah sangat maju, sumber pendapatan utama dari belanja negara adalah dari pajak. Pengeluaran pemerintah memiliki kaitan erat dengan penerimaan pajak dari penduduk negara tersebut. Negara dengan *country size* yang besar akan memiliki penerimaan dari pajak yang besar pula, namun di sisi lain juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dalam pembangunan dan penyediaan barang publik.

Alesina dan Wacziarg (1998) berpendapat bahwa *country size* dan *government size* memiliki hubungan yang negatif. Menurut mereka, hal ini karena pada awal tahun 1960, banyak negara bekas jajahan yang belum membangun dan meningkatkan sektor publik mereka. Sebagian besar dari negara tersebut lebih mengalokasikan pengeluaran mereka untuk menciptakan stabilitas politik dan pertahanan, bukan untuk menciptakan barang publik yang bersifat *non-rivalry* seperti jalan, taman, dan barang publik lainnya.

Menurut Richard dan Musgrave dalam Putriani (2011), perubahan populasi bisa merupakan suatu penentu utama pengeluaran pemerintah. Perubahan tingkat pertumbuhan populasi menyebabkan perubahan distribusi umur, dan kecenderungan ini direfleksikan dalam perubahan pengeluaran untuk fasilitas pendidikan. Semakin bertambah usia sekolah mengakibatkan tingginya pendaftaran untuk masuk sekolah, sehingga menjadi beban keuangan bagi negara. Jika kecenderungan populasi seperti ini terus berlanjut, akan mendorong meningkatnya fasilitas publik.

Menurut Rodrik dalam Parmeter dan Jetter (2015), negara dengan perekonomian yang terbuka cenderung memiliki *government size* yang besar. Hal

tersebut karena semakin terbukanya perekonomian suatu negara, maka akan meningkatkan ketidakpastian bagi warga negara tersebut sehingga tuntutan masyarakat terhadap jaminan keamanan oleh pemerintah akan semakin besar. Jika negara tersebut memiliki *country size* yang besar, maka pengeluaran yang harus dikeluarkan pemerintah juga akan semakin besar dalam menyediakan jaminan bagi penduduknya.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara *country size* dan *government size* tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Setiap negara tentu saja memiliki kebijakan sendiri dalam melakukan pengeluaran pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan penyediaan barang publik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan penduduknya. Dengan demikian, penelitian yang berkelanjutan untuk mengetahui hubungan antara *country size* dan *government size* ini tentu saja sangat diperlukan.

2.2 Penelitian sebelumnya

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan *trade openness*, *country size*, dan juga *government size*, dengan berbagai metode analisis yang kebanyakan menggunakan metode yang sama. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Sebagian besar peneliti seperti Cameron (1978), Alesina dan Spolaore (1997), Alesina dan Wacziarg (1998), Rodrik (1998), dan Shelton (2007), sepakat bahwa terdapat hubungan yang saling terkoneksi antara *trade openness*, *country size*, dan *government size*. Namun, masing-masing dari para peneliti tersebut memiliki cara

dan metode yang berbeda dalam membuktikan adanya hubungan yang terjadi antara ketiga variabel tersebut.

Alesina dan Wacziarg (1998) adalah yang pertama melakukan investigasi diantara ketiganya secara terperinci. Penelitian tersebut menggunakan model analisis *ordinary least square* (OLS). Alesina dan Wacziarg (1998) mendapatkan kesimpulan bahwa *country size* memiliki hubungan yang negatif dengan *government size* dan *trade openness*.

Selanjutnya, Benarroch dan Pandey (2012), melakukan penelitian tentang hubungan antara *trade openness* dan *government size*. Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Alesina and Wacziarg, 1998 ; Rodrik, 1998 ; Shelton, 2007), karena tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hubungan kausalitas antara *trade openness* dan *government size*. Dalam penelitian ini Benarroch dan Pandey (2012) menggunakan model data panel dinamis, untuk mengetahui apakah perubahan dalam *trade openness* akan mempengaruhi perubahan dalam *government size*. Mereka membagi pengeluaran pemerintah kedalam 8 kategori berbeda dan mengelompokkan Negara berdasarkan pendapatan rendah dan tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan, mereka menemukan hasil bahwa peningkatan dalam *trade openness* di Negara dengan pendapatan rendah akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan meningkat, sedangkan di Negara yang memiliki pendapatan tinggi, *trade openness* dan *government size* memiliki hubungan yang negatif. Jika *trade openness* meningkat, maka *government size* akan menurun. Menurut Benarroch dan Pandey (2102) hal ini terjadi karena pada

Negara yang berpendapatan rendah, akan cenderung memiliki pengeluaran pemerintah yang besar di sektor pendidikan untuk meningkatkan *human capital* yang dimiliki negara tersebut, sehingga mampu bersaing di pasar internasional di masa yang akan datang.

Ram (2009), juga melakukan penelitian tentang hubungan antara *trade openness*, *country size*, dan *government size*. Ram (2009) melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode data panel besar yang datanya diambil dari 154 negara dalam kurun waktu 41 tahun, yakni selama tahun 1960-2000. Dalam penelitian yang dilakukan, mereka menemukan hasil yang berbeda dengan Alesina dan Wacziarg (1998). Ram (2009) menemukan hubungan yang positif pada variabel *country size* terhadap *government size* dan *trade openness*. Argumen yang dikemukakan oleh Ram (2012) adalah bahwa peningkatan jumlah penduduk, akan meningkatkan total konsumsi, sehingga pemerintah harus meningkatkan belanjanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang lebih besar.

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang disampaikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, terdapat hubungan kausalitas dua arah antara variabel *country size* dan *trade openness*. Hubungan kausalitas dua arah juga terjadi pada variabel lainnya, yaitu *Trade openness* dan *government size*, serta *government size* dan *country size*.

Model analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode panel kausalitas granger yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Toda and Yamamoto (1995). Model ekonometri dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Trade openness (TO) – Government size (GS)

$$\begin{aligned}
 TO_{it} &= a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k TO_{i,t-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} b_1 GS_{i,t-1} + U_{1,i,t} \\
 GS_{it} &= a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k GS_{i,t-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} \beta_1 TO_{i,t-1} + U_{2,i,t} \dots \dots \dots (2.3)
 \end{aligned}$$

Trade openness (TO) – Country size (CS)

$$\begin{aligned}
 TO_{it} &= a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k TO_{i,t-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} b_1 CS_{i,t-1} + U_{1,i,t} \\
 CS_{it} &= a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k CS_{i,t-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} \beta_1 TO_{i,t-1} + U_{2,i,t} \dots \dots \dots (2.4)
 \end{aligned}$$

Government size (GS) – Country size (CS)

$$\begin{aligned}
 GS_{it} &= a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k GS_{i,t-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} b_1 CS_{i,t-1} + U_{1,i,t} \\
 CS_{it} &= a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k CS_{i,t-k} + \sum_{1-1 \rightarrow n} \beta_1 GS_{i,t-1} + U_{2,i,t} \dots \dots \dots (2.5)
 \end{aligned}$$

Dengan :

TO_{it} = *Trade openness* pada tahun t negara i

GS_{it} = *Government size* pada tahun t negara i

CS_{it} = *Country size* pada tahun t negara i

m,n = Jumlah lag

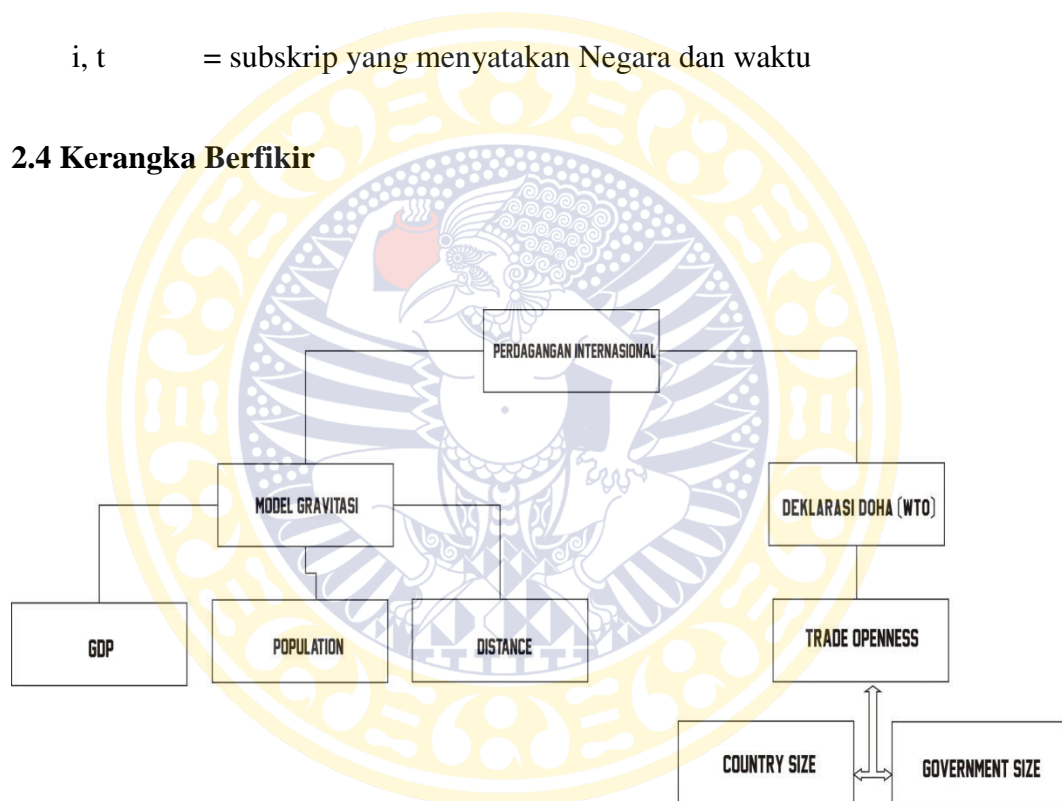
$u_{1,i,t}$, $u_{2,i,t}$ = variable pengganggu

a_0 = koefisien regresi yang membantu memperkirakan perubahan suatu variable atas dasar informasi yang terjadi pada masa lalu

b_1 , β_1 = Koefisien regresi yang menyediakan informasi mengenai arah kausalitas

i , t = subskrip yang menyatakan Negara dan waktu

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1

Kerangka berfikir

Berdasarkan gambar 2.1, kerangka berfikir dalam penelitian ini melihat bagaimana perdagangan internasional dapat dipengaruhi oleh model gravitasi, adanya perjanjian perdagangan internasional, dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi perdagangan dunia. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh

organisasi dunia (WTO) adalah tentang *trade openness*. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentu saja mempengaruhi perekonomian negara-negara di dunia. Beberapa yang mungkin terkena dampak adalah *country size* dan *government size* suatu negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat arah hubungan diantara variabel *trade openness*, *country size*, dan *government size*. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan terjadinya hubungan kausalitas dua arah, diantaranya dari *trade openness* mempengaruhi *government size* dan *government size* mempengaruhi *trade openness*. Begitu pula dengan hubungan antar variable lainnya, yakni *trade openness* dan *country size*, serta *government size* dengan *country size*, yang dapat saling mempengaruhi. Hubungan juga bisa berlaku hanya searah yaitu hanya dari *trade openness* saja yang mempengaruhi *government size*, dan *government size* tidak mempengaruhi *trade openness*. Hal yang sama bisa terjadi pada variabel yang lain, yaitu *trade openness* saja yang mempengaruhi *country size*, dan *country size* tidak mempengaruhi *trade openness*.